



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 9 (<i>sembilan</i>)
Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
Hari, Tanggal	: Rabu, 2 Juni 2021
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan RKP K/L dan RKA K/L Tahun Anggaran 2022
Hadir	: 1. dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI pada pukul 10.35 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 2 Juni 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
3. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor No. AG/03981/DPR RI/ III/2021 tanggal 23 Maret 2021, Perihal Rancangan Jadwal Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Tahun 2022).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri Koperasi dan UKM berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor: S-361/MK.02/2021 dan B238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021, tanggal 29 April 2021, telah ditetapkan Pagu Indikatif Belanja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.441.784.886.000,- (*satu triliun empat ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri Koperasi dan UKM sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran 3A surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait dengan anggaran dan kegiatan mengikat yang telah ditetapkan, yaitu:
 - Belanja Operasional Pegawai (Belanja Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai ASN) sebesar Rp 120.276.820.000,- (*seratus dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*)
 - (Biaya Operasional Belanja Daya dan Jasa) Pemeliharaan Gedung, Operasional dan Listrik/Air) sebesar Rp 82.982.508.000,- (*delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan ribu rupiah*)
 - Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp 236.695.523.000,- (*dua ratus tiga puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*)
 - Anggaran PNPB pada BLU sebesar Rp 231.148.000.000,- (*dua ratus tiga puluh satu miliar seratus empat puluh delapan juta rupiah*)
 - Pengembangan Sistem Data Tunggal UMKM sebesar Rp 600.000.000.000,- (*enam ratus miliar rupiah*)
 - Pembiayaan Rumah Produksi Bersama (*Factory Sharing*) sebesar Rp 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*)Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan membahas masing-masing program lebih lanjut secara detail dalam RDP.
3. Komisi VI DPR RI meminta komitmen Kementerian Koperasi dan UKM terkait Anggaran Fungsi Pendidikan untuk lebih efektif dalam meningkatkan kualitas dan daya saing SDM dengan memperbanyak program sosialisasi dan pelatihan untuk UMKM dan Koperasi dalam rangka meningkatkan indeks kewirausahaan.
4. Komisi VI DPR RI mendukung usulan Menteri Koperasi dan UKM untuk perubahan pagu per program untuk Program Dukungan Manajemen menjadi sebesar Rp 370.430.390.000,- (*tiga ratus tujuh puluh miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) atau 25,69% dan Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi menjadi sebesar Rp 1.071.354.886.000,- (*satu triliun tujuh puluh satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) atau 74,31% sebagaimana hasil *trilateral meeting* pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koperasi dan UKM.

5. Komisi DPR RI mendukung usulan Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana hasil pembahasan pada *Trilateral Meeting* dalam mengajukan Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 1.768.215.114.000,- (*satu triliun tujuh ratus enam puluh delapan miliar dua ratus lima belas juta seratus empat belas ribu rupiah*) yang akan dialokasikan untuk:
- Mandat PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebesar Rp 1.598.215.114.000,- (*satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima belas juta seratus empat belas ribu rupiah*) sebagai kekurangan anggaran atas usulan anggaran sebagaimana surat Menteri Koperasi dan UKM kepada Presiden RI terkait kebutuhan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022 sebesar Rp 3.210.000.000.000 (*tiga triliun dua ratus sepuluh miliar rupiah*) yang sudah dialokasikan pada Pagu Indikatif sebesar Rp 1.441.784.886.000 (*satu triliun empat ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*)
 - Belanja Operasional Pegawai sebesar Rp 20.000.000.000,- (*dua puluh miliar rupiah*) untuk menutupi kekurangan belanja pegawai dalam rangka rencana kenaikan tunjangan kinerja pegawai Kemenkop dan UKM tahun 2022 sebesar Rp 20.000.000.000,- (*dua puluh miliar rupiah*), sehingga semula Rp 120.000.000.000,- (*seratus dua puluh miliar rupiah*) menjadi Rp 140.000.000.000,- (*seratus empat puluh miliar rupiah*)
 - Kegiatan Layanan Pemasaran pada LLP-KUKM (Lembaga Layanan Pemasaran – Koperasi UKM) sebesar Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh miliar rupiah*)
 - Serta untuk memenuhi amanah dalam perpres dan inpres yang ditugaskan pada Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*)
6. Komisi VI DPR RI memahami kondisi terbatasnya sisa alokasi pagu indikatif Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022, maka kami menerima usulan adanya fleksibilitas alokasi anggaran pagu indikatif mengingat masih ada kegiatan-kegiatan yang belum teralokasikan.
7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.02 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,



GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. *fr*
A-327